

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi? Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi? Apakah kendala bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi dan bagaimana solusinya?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Slawi dan LBH Perisai Kabupaten Tegal. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori hukum dalam perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa bentuk bantuan hukum dalam proses persidangan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi adalah mendampingi tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan terutama tingkat penuntutan dan peradilan tindak pidana sudah, sehingga tejaminnya hak-hak asasi manusia, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversifikasi terhadap kasus tindak pidana agar pelaku tindak pidana mendapatkan hak-haknya. Bentuk-bentuk pendampingan hukum yang dapat diberikan untuk korban oleh LBH Perisai Kabupaten Tegal, dalam proses peradilan pidana dimulai dari pendampingan yang dilakukan pada saat korban mulai melaporan perkara ke kepolisian hingga perkara tersebut dijatuhi putusan di pengadilan. Dalam pendampingan yang dilakukan di proses peradilan pidana tersebut LBH Perisai Kabupaten Tegal, melakukan pengawalan perkara untuk memastikan tidak terjadinya pencideraan hak-hak korban dalam proses bergulirnya perkara tersebut. Kendala : Dalam prakteknya pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Slawi yang telah diterapkan hanya terbatas pada pemberian bantuan hukum yang diamanatkan oleh pasal 56 KUHAP. Dalam penunjukan penasehat hukum bagi Terdakwa berdasarkan amanat Pasal 56 KUHAP dalam hal Terdakwa tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Hakim seringkali membuat penetapan penunjukan penasehat hukum tanpa mengetahui terlebih dahulu apakah terdakwa mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Solusi: Menyediakan informasi layanan Posbakum bagi Terdakwa di Pengadilan Negeri Slawi. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan menempelkan papan informasi layanan Posbakum di depan Tahanan Pengadilan Negeri Slawi atau dengan menyediakan pamphlet berisi informasi layanan Posbakum di dalam ruang tahanan.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Persidangan, Tindak Pidana

ABSTRACT

Legal aid is a problem related to human rights, especially in terms of the implementation of the provision of legal aid. There are those who think that the law only protects rulers or people with good economic conditions. The formulation of the problem in this study is: What is the form of legal aid in criminal proceedings in the jurisdiction of the Slawi District Court? Legal aid institutions for victims in the jurisdiction of the Slawi District Court? What are the obstacles to legal aid in the criminal proceedings in the jurisdiction of the Slawi District Court and what are the solutions?

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study include descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies of interviews with Judges at the Slawi District Court and LBH Perisai, Tegal Regency. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using legal protection theory, legal certainty theory and legal theory from an Islamic perspective.

Based on the results of the research that the form of legal assistance in the criminal proceedings in the jurisdiction of the Slawi District Court is to accompany the suspect / defendant at every level of examination, especially the level of prosecution and criminal justice, so that human rights are guaranteed, during and after the trial and strive for diversion of criminal cases so that the perpetrators of criminal acts get their rights. The forms of legal assistance that can be provided to victims by LBH Perisai Tegal Regency, in the criminal justice process start from the assistance provided when the victim starts reporting the case to the police until the case is convicted in court. In the assistance carried out in the criminal justice process, LBH Perisai Tegal Regency, carries out case escort to ensure that the rights of victims are not harmed in the process of rolling the case. Constraints: In practice, the provision of legal aid at the Slawi District Court which has been applied is limited to the provision of legal aid as mandated by Article 56 of the Criminal Procedure Code. In the appointment of a legal advisor for the Defendant based on the mandate of Article 56 of the Criminal Procedure Code, in the event that an incapacitated Defendant is subject to a sentence of five years or more who does not have his own legal advisor, the Judge often makes the appointment of a legal advisor without knowing in advance whether the defendant is economically capable or not . Solution: Providing information on Posbakum services for the Defendant at the Slawi District Court. In this case, this can be done by posting the Posbakum service information board in front of the Slawi District Court detainees or by providing pamphlets containing information on the Posbakum service in the detention room.

Keywords: Legal Aid, Trial, Crime